



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, maka disusunlah Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2023.

Untuk mengetahui perkembangan, harapan serta kinerja yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, maka ditetapkan Rencana Strategis untuk menjadi acuan awal dalam mencapai visi yang dicita-citakan. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan. Kedepannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja, memperbaiki diri serta mampu mewujudkan visinya sesuai harapan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pada Laporan Capaian Kinerja ini, diantaranya memuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang berisikan Sasaran Perkin, Indikator Kinerja dan Sasaran Renstra. Pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020-2024 telah dimuat beberapa sasaran dan program yang prioritas. Pada form Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan telah dilakukan pengukuran untuk setiap kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian dari Target yang ditetapkan. Dalam evaluasi kinerja juga dimuat semua keberhasilan dan kegagalan, serta telah dilakukan analisis efisiensi untuk mengetahui tingkat efisiensi dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 ini, dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi, antara input dengan output dan antara kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Begitupun dilakukan analisa efektifitas untuk mengetahui keserasian/kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang diharapkan, dan manfaat kegiatan serta dampaknya. Selanjutnya, dilakukan pula analisa Akuntabilitas dengan cara mengalisa tingkat keterkaitan pencapaian kegiatan dan program dalam mewujudkan Sasaran Perkin sebagaimana yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Makassar, 06 Februari 2024

Pt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan,



H. Ali Yafid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. TUGAS
- B. FUNGSI
- C. SUSUNAN ORGANISASI

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. KEGIATAN
- B. TUJUAN
- C. SASARAN
- D. STRATEGI
- E. PROGRAM

BAB III : CAPAIAN KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM
- C. CAPAIAN KINERJA, POTENSI DAN PERMASALAHAN
- D. ANALISIS KEBERHASILAN
- E. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. KENDALA
- C. UPAYA TINDAK LANJUT

- LAMPIRAN :**
- I. STRUKTUR ORGANISASI
 - II. PERJANJIAN KINERJA KAKANWIL 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Kementerian/Lembaga menyusun Laporan Capaian Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strateginya.

Selain itu, penyusunan laporan ini adalah dalam rangka menyelaraskan perolehan Opini LKKA Kementerian Agama Tahun 2023 dan untuk penyempurnaan Lampiran Keputusan Kinerja Tahunan Menteri Agama Tahun 2023.

Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil dan sebagai penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan LCK ini dilakukan dengan sistem berjenjang dengan menerapkan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan dari setiap satuan organisasi di lingkup Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga Laporan Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023 selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberi umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Selanjutnya kami yakin bahwa LCK ini belum sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami hargai untuk penyempurnaan LCK ini, serta pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 06 Februari 2024

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan,



Ali Yafid

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan, serta mengembangkan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan sebuah rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan juga prosedur operasional serta rujukan-rujukan lain. Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

A. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,
- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha sesuai peraturan perundang-undangan,
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi,

- d. Pembinaan kerukunan umat beragama,
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program,
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

C. Susunan Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- 1. Bagian Tata Usaha;
- 2. Bidang Urusan Agama Islam;
- 3. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 4. Bidang Pendidikan Madrasah;
- 5. Bidang Pendidikan Agama Islam;
- 6. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- 7. Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
- 8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
- 9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
- 10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
- 11. Pembimbing Masyarakat Buddha;
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi :

1. *Bagian Tata Usaha*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi dan sistem informasi manajemen dan akuntansi

- barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
 - d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
 - e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
 - f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama;
 - g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi..

Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Urusan Agama Islam

Bidang Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam;

- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam.

Bidang Urusan Agama Islam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penyelenggaraan haji dan umrah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
- d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana dan prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta kesiswaan madrasah;
- d. pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan madrasah;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi madrasah, guru dan tenaga kependidikan madrasah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan

diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah formal, ma'had aly, pendidikan pondok pesantren, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Pendidikan Agama Islam

Bidang Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama Islam;

- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas/ sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama Islam; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam.

Bidang Pendidikan Agama Islam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

7. Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan

- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

8. *Pembimbing Masyarakat Kristen*

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Pembimbing Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Bimbingan Masyarakat Kristen meliputi lembaga dan sarana agama, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, pendidikan agama Kristen, supervisi pendidikan, dan pelayanan keesaan gereja;
- b. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Kristen.

9. *Pembimbing Masyarakat Katolik*

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Pembimbing Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bimbingan masyarakat Katolik yang meliputi lembaga keagamaan, sarana

keagamaan, penyuluhan, tenaga teknis keagamaan, dan Pendidikan Agama Katolik;

- b. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang Bimbingan Masyarakat Katolik.

10. Pembimbing Masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Pembimbing Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bimbingan masyarakat Hindu meliputi sarana, upacara, seni keagamaan, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan pendidikan Agama Hindu, lembaga dan pemberdayaan umat;
- b. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan Masyarakat Hindu.

11. Pembimbing Masyarakat Buddha

Pembimbing Masyarakat Buddha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut diatas, Pembimbing Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bimbingan Masyarakat Buddha meliputi sarana, upacara, seni keagamaan, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan Pendidikan Agama Buddha, lembaga dan pemberdayaan umat;

- b. Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang Bimbingan Masyarakat Buddha.

12. *Jabatan Fungsional*

- a. Pejabat fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kelompok pejabat fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa jenis dan jenjang jabatan sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- c. Kebutuhan setiap jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya disusun berdasarkan Perencanaan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan, agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategi, baik itu lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan strategik yang jelas dan sinergis, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dapat merumuskan Rencana Strategik yang didalamnya mencakup :

B. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang dirujuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, terdapat enam tujuan yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial. Hal ini akan diraih dengan jalan meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM pelayan keagamaan, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Penguatan kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama. Beberapa hal yang akan dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan dalam rangka hal tersebut adalah mewujudkan Kerukunan Hidup Umat Beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan musyawarah serta dialog antar umat beragama.
- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Hal ini akan diraih dengan jalan meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan tertib administrasi, dan penyediaan sarana dan prasarana layanan keagamaan.

- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berkualitas. Hal ini akan diraih dengan jalan meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Negeri maupun Swasta serta Lembaga Pendidikan Keagamaan lain agar mampu bersaing dengan Lembaga Pendidikan Umum setingkat. Selain itu meningkatkan peran serta Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- e. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Hal ini akan diraih dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta penajaman program kerja yang lebih akurat dan terukur terhadap sasaran yang ingin dicapai organisasi. Selain itu dalam hal pelayanan Perjalanan Ibadah Haji ditingkatkan dengan cara meningkatkan pembinaan, pelayanan, rasa adil bagi jamaah dan manajemen penyelenggaraan Haji Khususnya di bidang organisasi, tatalaksana, SDM dan pengelolaan BPIH yang lebih transparan dan akuntabel.

C. Sasaran

Hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, dengan meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan dan intensifnya pembinaan;
- b. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup umat beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Meningkatnya mutu pendidikan pada Madrasah serta PAI pada Sekolah Umum, baik tingkat dasar maupun menengah;
- d. Meningkatnya peran serta Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Agama dan peningkatan kualitas keimanan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana prasarana;
- e. Meningkatnya peran serta Lembaga Zakat dan Wakaf sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui peningkatan kualitas SDM pengelola Zakat dan Wakaf,

- f. Meningkatnya kemandirian Jamaah haji serta profesionalisme Petugas Haji;
- g. Optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan serta pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan menuju terbangunnya citra positif yang bersih dan berwibawa pada Kementerian Agama Sulawesi Selatan.

D. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan strategi untuk mencapainya melalui kebijakan-kebijakan sebagai pedoman, petunjuk dan dasar hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Kantor Wilayah;
- b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
- c. Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- d. Peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum;
- e. Peningkatan peran serta Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Agama;
- f. Peningkatan peran serta Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat;
- g. Berjalannya Standar Pelayanan Minimal dalam Operasional Pelayanan Haji.

E. Program

Dalam rangka implementasi Strategi tersebut maka ditetapkan Program Kerja yang akan dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan. Program tersebut dilaksanakan setiap tahun selama periode Renstra termasuk pada tahun 2023. Program tersebut dijabarkan melalui beberapa kegiatan pokok yang banyak memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan merealisasikan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah.

Program-program yang menjadi prioritas dan telah dicanangkan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Moderasi Beragama;
2. Transformasi Digital;
3. Revitalisasi KUA;
4. Kemandirian Pesantren;
5. Cyber Islamic University;
6. Religiosity Index; dan
7. Tahun Kerukunan Umat Beragama.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang digunakan dalam pengukuran Capaian Kinerja telah dijabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, penilaian capaian kinerja dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan memadai pada masing-masing Unit Organisasi, setelah itu pengukurannya dilakukan dengan cara manual ataupun elektronik dengan menggunakan Aplikasi Pelaporan Kinerja Kementerian Agama, sipka.kemenag.go.id.

Berdasarkan perhitungan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2023 terlihat rata-rata output kinerja kegiatan meraih hasil yang 'baik' ditengah situasi pemulihan pandemik yang belum stabil hingga akhir tahun.

Pembangunan Bidang Keagamaan di Sulawesi Selatan, capaian kinerja, potensi dan permasalahan akan ditelaah menurut 5 (lima) bidang fokus yaitu Bimbingan Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Dukungan Manajemen pada Pelaksanaan Tugas Teknis. Tinjauan mengenai potensi dan permasalahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting bagi keberhasilan strategi Pembangunan Agama di Sulawesi Selatan, meliputi regulasi dan kebijakan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Ketatalaksanaan serta Penganggaran.

B. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program

Terdapat delapan Program pada tahun 2021 & 2022 yang menjadi Program Pembangunan Keagamaan di Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaksanaan Program tersebut diberi support anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2021 & 2022, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ataupun skema pembiayaan lainnya. Kinerja

Program tersebut diukur menggunakan Indikator Kinerja (IKSK) yang rinci melalui media Aplikasi Sipka.Kemenag.go.id. Berikut jumlah anggaran beserta realisasi anggaran Program Pembangunan Keagamaan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel berdasarkan DIPA tahun 2022 dan 2023.

Tabel. Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023.

| Program | Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | % | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 | % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Program Dukungan Manajemen dan Kerukunan Umat Beragama | Rp 21,550,400,000 | Rp 21,108,052,111 | 97.95% | Rp 45.006.977,000 | Rp 44.916.187.635 | 99.80% |
| Program Pendidikan Islam | Rp 291,943,070,000 | Rp 287,260,174,754 | 98.40% | Rp 135,556,841,000 | Rp 134,999,325,508 | 99.59% |
| Program Bimas Islam | Rp 11,859,028,000 | Rp 11,476,438,754 | 96.77% | Rp 9,234,927,000 | Rp 7,853,041,252 | 85.04% |
| Program Bimas Kristen | Rp 1,400,546,000 | Rp 1,346,527,347 | 96.14% | Rp 939,850,000 | Rp 930,112,950 | 98.97% |
| Program Bimas Katolik | Rp 2,288,127,000 | Rp 2,150,297,541 | 93.98% | Rp 1,715,138,000 | Rp 1,710,760,268 | 99.74% |
| Program Bimas Hindu | Rp 1,883,960,000 | Rp 1,876,814,062 | 99.62% | Rp 1,775,030,000 | Rp 1,765,451,106 | 99.46% |
| Program Bimas Buddha | Rp 1,520,377,000 | Rp 1,498,198,396 | 98.54% | Rp 1,228,750,000 | Rp 1,228,033,945 | 99.94% |
| Program Penyelenggaraan Haji dan umrah | Rp 11,770,954,000 | Rp 11,284,770,451 | 95.87% | Rp 13,601,874,000 | Rp 13,509,652,417 | 99.32% |
| Total | Rp 344,216,462,000 | Rp 338,001,273,222 | 98.20% | Rp 209,059,387,000 | Rp 206,912,575,081 | 99% |

Sumber. TIM Keuangan & BMN Kanwil Kemenag Sulsel

C. Capaian Kinerja, Potensi dan Permasalahan

Capaian Kinerja, Potensi dan Permasalahan Pembangunan Bidang Keagamaan di Sulawesi Selatan akan ditelaah menurut lima Bidang Fokus diantaranya.

C.1. Bimbingan Masyarakat

Pada Program Bimbingan Masyarakat, upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan bidang agama di Sulawesi Selatan. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang seimbang, moderat dan inklusif.

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Program yang diharapkan tersebut memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang didapatkan pada tahun 2023 ini berasal dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beberapa upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada Program Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2023 ini diantaranya dengan pembangunan Sarana Kantor Urusan Agama Kecamatan sebanyak 6 kantor yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembangunan KUA tersebut diprioritaskan pada daerah yang membutuhkan diantaranya Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bantaeng, Kep. Selayar dan Kota Parepare.

Tabel. Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai SBSN Tahun 2023

| No. | Nama Satker | Kab./Kota | Provinsi | Anggaran SBSN | Realisasi Anggaran | | | Progres Fisik (%) |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Jumlah | % dari Pagu | % dari Kontrak | |
| a | b | c | d | e | j | k | l | q |
| 1 | KUA KEC. TOMPOBULU | KAB. BANTAENG | SULAWESI SELATAN | 1,440,000,000 | 1,439,999,340 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
| 2 | KUA KEC. BENTENG | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | SULAWESI SELATAN | 1,500,000,000 | 1,499,495,000 | 99.97% | 100.00% | 100.00 |
| 3 | KUA KEC. PONRANG SELATAN | KAB. LUWU | SULAWESI SELATAN | 1,440,000,000 | 1,440,000,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
| 4 | KUA KEC. BURAU | KAB. LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | 1,440,000,000 | 1,439,990,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
| 5 | KUA KEC. SUKAMAJU | KAB. LUWU UTARA | SULAWESI SELATAN | 1,410,000,000 | 1,409,853,000 | 99.99% | 100.00% | 100.00 |
| 6 | KUA KEC. SOREANG | KOTA PAREPARE | SULAWESI SELATAN | 1,400,000,000 | 1,399,990,000 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
| JUMLAH TOTAL | | | | 8,630,000,000 | 8,629,327,340 | 99.99% | 100.00% | 100 |

Sumber. TIM Pengadaan Barang/Jasa Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Apresiasi terhadap para Penyuluh Agama Islam di Indonesia yang terus berjuang dalam pembangunan negara melalui bimbingan kepenyuluhan yang kreatif, inovatif, dan berdampak. Terfokus pada tujuh kategori penghargaan pada PAI Award tahun ini, yaitu Peningkatan Literasi Al-Qur'an, Pendampingan Kelompok Rentan, Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Penegakan Hukum, Pelestarian Lingkungan, dan Metode Penyuluhan Baru.

Tujuh penyuluh Agama Islam yang telah memperoleh award pada lomba penyuluh agama Islam award tahun 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam tujuh kategori, telah mengikuti penilaian lomba penyuluh agama Islam award tahun 2023 tingkat Nasional berupa penilaian Portofolio, Video, dan Karya Tulis Ilmiah pada Seleksi Tahap 1 (satu) Penyuluh Agama Islam Award Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023

Hasil penilaiannya telah di umumkan oleh Tim juri, dimana Tiga orang Penyuluh Agama Islam utusan Sulawesi Selatan, berhasil lolos 10 (sepuluh) Nominasi . Yaitu, SURYANI, penyuluh agama asal Kab. Sinjai pada kategori Kesehatan masyarakat , FATMA UTAMI JUHAROH, Penyuluh agama Asal Kab. Bone pada kategori metode penyuluhan baru, dan Sidrah, penyuluh Agama asal Kab. Soppeng pada kategori peningkatan Literasi Al-Qur'an..

Gambar. Foto bersama pada Pengukuhan Organisasi Profesi PAI dirangkaikan dengan Penyuluh Agama Islam Award



Sumber: TIM Humas Kanwil Sulsel

Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati. Program yang diluncurkan tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam UU No 33

tahun 2014, Ada tiga aktor yang diatur terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal utamanya di Sulawesi Selatan sebanyak 13.591 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) sertifikat. Sedangkan Produk yang sudah terbit sertifikasi halalnya ialah sebanyak 57.913 (lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga belas) produk sampai dengan tahun 2023.

Gambar. Silaturahmi dengan Pengurus LPPOM MUI



Sumber: TIM Humas Kanwil Sulsel

Pada Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan ketersediaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,715,138,000 (Pagu Revisi), tujuan dan sasaran pembangunan bidang keagamaan Katolik tercapai sebesar 100%. sasaran tersebut diantaranya terkait Upaya Penguatan Moderasi Beragama bagi SMAK (Katolik) di Sulawesi Selatan. Dengan pembinaan Moderasi Beragama kepada Guru dan Pengawas Agama Katolik. Seluruh program berjalan dengan baik ditandai dengan realisasi anggaran Rp 1,710,760,268 atau 99.74%.

Gambar. Kontingen Pesparani Sulsel di DKI Jakarta



Sumber. Humas Kanwil Kemenag Sulsel

Pada perhelatan Pesparani III di Ibukota DKI Jakarta, kontingen Sulawesi Selatan berhasil membawa pulang 8 medali dengan 5 emas, 2 perak dan 1 perunggu.

Tabel. Prestasi Prov. Sulawesi Selatan Keg. Pesparani Tk. Nasional 2023

| No. | Pencapaian Sasaran | Tingkat | Prestasi |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) | Nasional | Emas |
| 2 | Mazmur Anak | Nasional | Emas |
| 3 | Mazmur Remaja | Nasional | Emas |
| 4 | Mazmur Orang Muda Katolik | Nasional | Emas |
| 5 | Tutor Kitab Suci (TKS) | Nasional | Emas |
| 6 | Mazmur Dewasa | Nasional | Perak |
| 7 | Cerdas Cermat Rohani (CCR) Remaja | Nasional | Perak |
| 8 | Cerdas Cermat Rohani (CCR) Anak | Nasional | Perunggu |

Sumber. Bimas Katolik Kanwil Kemenag Sulsel

Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1,775,030,000, telah dicapai kinerja sebesar 100% dari target renstra yang diberikan dengan capaian realisasi sebesar Rp 1,765,451,106 atau 99.46%. Capaian Program diantaranya terkait Penguatan Moderasi Beragama Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu serta dialog kerukunan intern umat beragama, yang bertujuan agar tokoh atau pimpinan lembaga umat Hindu dapat melaksanakan pelayanan dengan baik antarumat beragama dan berupaya membangun serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Hindu yang lebih baik dalam menjalin kerukunan antarumat. Selain itu,

teralaksananya penanaman pendidikan karakter dan kewarganegaraan kepada siswa, dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada pasraman, menciptakan generasi muda Hindu yang cerdas dan memiliki wawasan kebangsaan.

Gambar. Dialog Intern Kerukunan Agama Hindu dan Moderasi Beragama



Sumber. Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Selain itu, upaya membumikan Moderasi Beragama di tengah umat Hindu terus dilakukan oleh Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) dalam pembinaan Keluarga Sukhinah dengan mengusung Tema penguatan peran Keluarga dalam Penanaman Nilai Toleransi.

Gambar. Pembinaan Keluarga Sukhinah



Sumber. Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Adapun pada Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1,228,750,000, serta capaian kinerja program sebesar 100% dari target yang ditetapkan, maka terlihat pembangunan Bidang Keagamaan Buddha di Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ralisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 1,228,003,945 atau sebesar 99.94%.

Capaian Sasaran Program Bimas Buddha diantaranya dilakukan dengan peningkatan kualitas Penyuluh Agama Buddha, dengan rasio penyuluh dengan kelompok sasaran yang sesuai, Pembinaan Guru, Keluarga Hitta Sukkhaya, Sippa Dhamma Samajja serta Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha.

Gambar. Suasana Pembinaan Sippa Dhamma Samajja



Sumber: Bimas Buddha Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan

Sejalan dengan Tujuh Program Prioritas Kementerian Agama, pada Bimas Buddha diadakan Penguatan Moderasi Beragama bagi Lembaga Keagamaan Buddha dan siswa pendidikan agama. Selain itu, fokus Kanwil Kemenag Prov. Sulsel dalam penanganan konflik internal Agama Buddha dilakukan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha sehingga dapat tertangani dengan baik.

Gambar. Suasana Pembukaan Dialog Intern Umat Buddha



Sumber. Bimas Buddha Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Pada Bidang Pembimbing Masyarakat Keagamaan Kristen, dengan dukungan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 939,850,000 terlihat capaian kinerja program tercapai secara keseluruhan dari target Tahun 2022 yang ditetapkan pada Renstra. Capaian kinerja ini juga terlihat dari realisasi anggaran sebesar Rp 930,122,950 atau sebesar 98.97% pada akhir tahun 2022.

Beberapa sasaran yang menjadi fokus pembangunan Bidang Keagamaan Kristen di Sulawesi Selatan diantaranya, Upaya peningkatan kualitas penyuluhan Agama Kristen, Pembinaan peningkatan standar mutu Pendidikan Keagamaan Kristen di Sulawesi Selatan, Penguatan moderasi beragama dalam Pendidikan Keagamaan Kristen, serta Penanganan konflik intern Agama Kristen yang didampingi dengan baik.

Selain itu, pada tahun 2023 Pembimas Kristen menyalurkan Kitab Suci sebanyak 500 (lima ratus) eksemplar dan memberikan Bantuan Pembangunan/Renovasi kepada 4 Rumah Ibadah yang masing-masing menerima Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Adapun 4 Rumah Ibadah tersebut yakni:

1. Gereja Segala Bangsa di Pampang, Kota Makassar;
2. Gereja GPdI Elshadai Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar;
3. Gereja GPIB Bukit Zaitun jl. Opu Daeng Risadju, Kota Makassar;
4. Gereja Toraja Sundung, Kabupaten Tana Toraja.

Gambar. Penyerahan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah



Sumber. Bimas Kristen Kanwil Kemenag Sulsel

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama diantaranya:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sementara itu, permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah di antaranya:

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;

- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih belum memadai.

C.2. Kerukunan Umat Beragama

Pada Sub Program Kerukunan Umat Beragama, dalam rangka menyongsong Tahun Toleransi 2023 Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Delapan Provinsi Prioritas dalam mempersiapkan Tahun Toleransi tersebut. Dengan penetapan itu, Sulawesi Selatan mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder utama dan pendukung.

Indikator Kinerja terkait meningkatnya harmoni sosial dan Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama yang ditandai dengan:

- a. Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama

Upaya meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan dilakukan dengan penyelesaian konflik Antar Umat beragama. Konflik sosial sebetulnya merupakan gejala yang universal, artinya suatu peristiwa yang dapat terjadi didalam setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Namun sepanjang kurun waktu tujuh tahun terakhir, kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Selatan berjalan dengan sangat kondusif.

Pada tahun 2023 jumlah konflik antar umat beragama yang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak satu konflik yang pada akhirnya dapat diselesaikan berkat kerjasama berbagai pihak terutama dengan pihak pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama setempat sehingga konflik yang terjadi tidak meluas dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dengan berbagai pihak. Hal ini juga menunjukkan capaian kinerja terkait jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama tahun 2023 yang tertuang dalam rencana strategis telah tercapai.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi

Kondisi kerukunan yang dapat dijelaskan melalui skor pada pada penilaian survei kerukunan umat beragama, adalah penentuan area berdasarkan *cut off* yang disepakati lima level, meliputi:

| | |
|--------|----------------------------|
| 0-20 | Sangat Tidak Rukun |
| 21-40 | Tidak Rukun |
| 41-60 | Rukun dalam Tingkat Sedang |
| 61-80 | Rukun |
| 80-100 | Sangat Rukun |

Jika dilihat dari tingkatan kerukunan, maka sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Selatan selalu mencapai level 'RUKUN' walaupun selalu terjadi fluktuasi nilai indeks kerukunan umat beragama tiap tahun dan pada tahun 2023 berada di angka 76,91.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain melalui kegiatan:

1. Orientasi Pelopor Moderasi Beragama tingkat Provinsi dan Kab/Kota;
2. Penguatan Moderasi Beragama tingkat Provinsi dan Kab/Kota;
3. Deradikalisasi, *Counter* Radikalisasi dan Workshop Kerukunan Umat Beragama;
4. Dialog Kerukunan dan Kebangsaan;
5. Kemah Pemuda lintas agama tingkat Provinsi;
6. Publikasi Kerukunan Umat Beragama.

Selain itu, melalui TIM Bina Lembaga dan KUB, sebanyak 60 (enam puluh) Juta rupiah telah disalurkan bantuan Desa Sadar Kerukunan kepada 2 Desa yakni Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten

Pinrang dan Kelurahan Palawa Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara masing-masing mendapatkan 30 juta rupiah.

Gambar. Orientasi Pelopor Moderasi Beragama Tingkat Provinsi



Sumber: Tim Bina Lembaga dan KUB Kanwil Kemenag Sulsel

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengembangkan kerukunan umat beragama adalah menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik. Karenanya keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan untuk membantu pemerintah dalam memelihara dan mengendalikan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun memberikan bantuan operasional kepada Forum Kerukunan Umat Beragama baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab/Kota agar pelaksanaan pengembangan kerukunan umat beragama dapat terus dilaksanakan oleh FKUB di Sulawesi Selatan.

Gambar. Suasana Pembukaan Dialog Kerukunan Lintas Agama



Sumber. Tim Bina Lembaga dan KUB Kanwil Kemenag Sulsel

Pelaksanaan Dialog Kerukunan Intern Umat beragama dan Moderasi Beragama Khonghucu yang digelar di Klenteng Ibu Agung Bahari diikuti oleh umat lintas agama.

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kerukunan umat beragama :

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 FKUB Kabupaten/Kota;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara itu, permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

Gambar. Pembukaan Orientasi Pelopor Moderasi Beragama



Sumber. Tim Bina Lembaga dan KUB Kanwil Kemenag Sulsel

C.3. Pendidikan Agama dan Keagamaan

Di Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, sesuai arahan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, penerapan standar pelayanan dan evaluasi Pendidikan Agama, serta peningkatan pembinaan terhadap lembaga Pendidikan Keagamaan yang berkembang di masyarakat menjadi potensi yang memerlukan kebijakan penguatan dan pemberdayaan. Potensi yang baik ini akan didukung dan ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan turunan yang bisa dijadikan pedoman peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan salah satu program prioritas pada Pembangunan Bidang Agama oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel. Jumlah Guru pada Bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2023

| | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN | SATUAN |
|---|---|--------------|-------------|
| 1 | Jumlah Guru Tahun 2023 | 28928 | Guru |
| | a. PNS | 5584 | Guru |
| | b. PPPK (P3K) | 2666 | Guru |
| | c. Non PNS | 20678 | Guru |
| 2 | Guru yang Sudah sertifikasi | 11228 | Guru |
| | a. PNS | 4777 | Guru |
| | b. PPPK (P3K) | 2169 | Guru |
| | c. Non PNS | 4282 | Guru |
| 3 | Guru yang Belum sertifikasi | 1304 | Guru |
| | a. PNS | 807 | Guru |
| | b. PPPK (P3K) | 497 | Guru |
| | c. Non PNS | 16396 | Guru |
| 4 | Guru madrasah yang lulus sertifikasi Tahun 2023 | 285 | Guru |

Sumber: Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Prov. Sulawesi Selatan

Kemajuan dalam Teknologi disambut oleh Siswa-Siswi Madrasah seperti pada Tim Robotik MTsN 2 Jeneponto yang meraih 6 juara dalam ajang kompetisi robotika internasional 12th World Robotic for Peace 2023 oleh International Robotic Training and Competition (IRTC) bekerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia yang berlangsung 22 - 27 Oktober 2022 di Singapura.

Beberapa kategori lomba yang dimenangkan yakni juara 1 kategori Cooding Pro, juara 1 kategori Transporter IOT, juara 1 kategori Soccer IOT 500gr, juara 1 Kategori LF Analog, juara 2 Best Poin LF Analog Mikro dan juara 2 kategori Sumo IOT 1Kg.

Gambar. Tim Robotik 12th World Robotic for Peace 2023



Sumber: TIM Humas Kanwil Prov. Sulsel

Keberhasilan ini merupakan kerjasama guru, baik guru mapel dan mapel agama dalam melakukan pembimbingan pada siswa, hal ini di lakukan karena KSM adalah kompetisi yang terintegrasi mapel umum dan agama. Dukungan kepala Madrasah, para orang tua siswa, kakan Kemenag dan seluruh warga madrasah sehingga para siswa yang ikut kompetisi berhasil mencapai prestasi akademik.

Gambar. Juara Kompetisi Sains Madrasah Nasional



Sumber: TIM Humas Kanwil Sulsel

Beberapa capaian pelaksanaan Program Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan terlihat pada tabel berikut.

Tabel. Beberapa Capaian Program Pendidikan Islam pada Bidang PAIS Tahun 2023 di Sulawesi Selatan

| NO | PENCAPAIAN SASARAN / PRESTASI | BULAN | TINGKAT | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 1 | PEMBINAAN GURU PAI | Maret 2022 | Propinsi | Tools Program |
| 2 | PENGUATAN MODERASI BERAGAMA | Maret 2022 | Propinsi | |
| 3 | REKRUITMEN PELATIH DAERAH PPKN | Maret 2022 | Propinsi | |
| 4 | MGMP GURU PAI | Maret 2022 | Propinsi | |
| 5 | DIKLAT PPG GURU PAI BATCH 1 | April 2022 | Propinsi | |
| 6 | DIKLAT PPG GURU PAI BATCH 2 | Agustus 2022 | Propinsi | |
| 7 | RAKOR PENGAWAS PAI | Oktober 2022 | Propinsi | |

Sumber. Bidang PAIS Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Gambar. Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI



Sumber: TIM Humas Kanwil Sulsel

Kafilah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menorehkan prestasi yang membanggakan pada gelaran Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVII Tingkat Nasional di Provinsi Jambi dengan menempati peringkat ketujuh dari 34 provinsi yang mengikuti event 2 tahunan ini.

Gambar. Peserta Juara pada kegiatan STQH Nasional XXVII



Sumber: TIM Humas Kanwil Prov. Susel

Dengan raihan 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu serta juara harapan 1 dan 2, berhasil mendongkrak posisi Sulsel naik 2 peringkat dari STQH tahun 2021 di Sofifi Provinsi Maluku Utara yang hanya bertengger di urutan kesembilan.

Tabel. Prestasi Prov. Sulawesi Selatan Keg. STQH Nasional XXVIII 2023

| No. | Pencapaian Sasaran | Tingkat | Prestasi |
|-----|--|----------|-------------|
| 1 | Hifzh Al Qur'an Golongan 30 Juz (Puteri) | Nasional | Terbaik I |
| 2 | Musabaqah Al Hadits, Golongan Hafalan 100 Hadits dengan sanad (Puteri) | Nasional | Terbaik II |
| 3 | Tafsir Al Qur'an, Golongan Bahasa Arab (Puteri) | Nasional | Terbaik III |
| 4 | Musabaqah Al Hadits, Golongan Hafalan 500 Hadits tanpa sanad (Putera) | Nasional | Harapan I |
| 5 | Tilawah, Golongan Anak-anak (Putera) | Nasional | Harapan II |

Sumber. TIM Humas Kanwil Kemenag Sulsel

C.4. Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan ibadah Haji Reguler pada hakikatnya merupakan pelayanan publik yang dalam penyelenggaraannya harus selalu dievaluasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya meningkatkan kapasitas pelaksana.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2023 di Sulawesi Selatan telah dibangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terintegrasi (PLHUT) yang dibiayai SBSN. Terdapat 5 Kabupaten yang terpilih untuk pembangunan PLHUT tahun 2022 yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.

Tabel. Anggaran dan realisasi Pembangunan PLHUT di Sulawesi Selatan Tahun 2023

| NO | NAMA KEGIATAN | TOTAL PAGU ANGGARAN | KONSTRUKSI GEDUNG | | | | | REALISASI KEUANGAN | |
|----|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | MASA PELAKSANAAN | AWAL KONTRAK | AKHIR KONTRAK | PROGRES | TGL SELESAI/BAST | Rp | (%) |
| 1 | Revitalisasi & Pembangunan PLHUT Kab. Takalar | 3,091,308,000 | 180 Hari Kalender | 24 Maret 2023 | 19 September 2023 | 100% | 19 September 2023 | 3,091,308,000 | 100.00% |
| 2 | Revitalisasi & Pembangunan PLHUT Kab. Barru | 3,271,932,000 | 180 Hari Kalender | 24 Maret 2023 | 19 September 2023 | 100% | 19 September 2023 | 3,271,330,600 | 99.98% |
| 3 | Revitalisasi & Pembangunan PLHUT Kab. Soppeng | 3,173,794,000 | 180 Hari Kalender | 24 Maret 2023 | 19 September 2023 | 100% | 19 September 2023 | 3,173,794,000 | 100.00% |
| 4 | Revitalisasi & Pembangunan PLHUT Kota Palopo | 3,329,957,000 | 180 Hari Kalender | 10 April 2023 | 6 Oktober 2023 | 100% | 6 Oktober 2023 | 3,329,956,500 | 100.00% |
| 5 | Revitalisasi & Pembangunan PLHUT Kab. Luwu Timur | 3,477,787,000 | 180 Hari Kalender | 13 April 2023 | 9 Oktober 2023 | 100% | 9 Oktober 2023 | 3,477,786,900 | 100.00% |
| | | 16,344,778,000 | TOTAL REALISASI | | | | | 16,344,176,000 | 99.996% |

Sumber. Tim Pengadaan Barang/Jasa Kanwil Kemenag Sulsel

Pada table di atas menunjukkan bahwa pembangunan Gedung PLHUT yang bersumber dari dana SBSN dapat direalisasikan 100% baik dari segi anggaran maupun fisik bangunan.

Hingga akhir tahun 2022, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar 100% (predikat Sangat Baik) dari target Renstra yang ditetapkan. Dengan dukungan anggaran Program sebesar Rp 13,601,874,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13,509,652,417 (99.32%) terlihat capaian kinerja yang efektif pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah Sulawesi Selatan.

Setelah situasi Pandemi Covid 19 secara global yang mulai dapat dikendalikan, pemerintah Saudi Arabia akhirnya menetapkan kebijakan menyelenggarakan Ibadah Haji secara umum bagi negara-negara di dunia. Berbeda dengan tahun sebelumnya 2022. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pembatasan-pembatasan yang ketat utamanya dari segi pemenuhan protocol Kesehatan (covid-19) seperti kewajiban Jemaah haji telah menerima vaksinansi lengkap. Selain itu, Arab Saudi juga mempersyaratkan batas usia yang boleh melaksanakan ibadah haji yaitu maksimal 65 tahun. Namun pada tahun 2023, dengan mengusung tema “Haji Ramah Lansia”

Gambar. Rencana Perjalanan Haji Jemaah Indonesia Tahun 2023



Sumber. Ditjen PHU Kemenag RI

Tahun 2023, Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Mereka sudah melakukan proses pelunasan sejak 11 April – 5 Mei 2023. Sulawesi Selatan sendiri mendapatkan kuota sebanyak 6.826 jemaah nilai yang sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.302 orang.

Tabel. Kuota Haji Kab./Kota Sulawesi Selatan Tahun 2023

| NO | KAB./KOTA | KUOTA | NO | KAB./KOTA | KUOTA |
|----|------------------|-------|----|-------------------|-------|
| 1 | KOTA MAKASSAR | 1076 | 13 | KAB. JENEPONTO | 324 |
| 2 | KOTA PARE-PARE | 115 | 14 | KAB. SELAYAR | 108 |
| 3 | KAB. PINRANG | 339 | 15 | KAB. TAKALAR | 248 |
| 4 | KAB. GOWA | 570 | 16 | KAB. BARRU | 162 |
| 5 | KAB. WAJO | 383 | 17 | KAB. SIDRAP | 239 |
| 6 | KAB. BONE | 709 | 18 | KAB. PANGKEP | 287 |
| 7 | KAB. TANA TORAJA | 33 | 19 | KAB. SOPPENG | 237 |
| 8 | KAB. MAROS | 295 | 20 | KAB. ENREKANG | 177 |
| 9 | KAB. LUWU | 258 | 21 | KAB. LUWU UTARA | 217 |
| 10 | KAB. SINJAI | 221 | 22 | KAB. PALOPO | 102 |
| 11 | KAB. BULUKUMBA | 385 | 23 | KAB. LUWU TIMUR | 148 |
| 12 | KAB. BANTAENG | 174 | 24 | KAB. TORAJA UTARA | 19 |

Sumber. Bidang PHU Kanwil Kemenag Sulsel

Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel telah mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemberangkatan Jemaah dari embarkasi hingga debarkasi. Mulai dengan membentuk PPIH Embarkasi/Debarkasi Makassar dan pendamping PPIH serta mempersiapkan para petugas haji baik yang mendampingi Jemaah (kloter) maupun yang bertugas di Arab Saudi.

Gambar. Apel Siaga dihadiri Stake Holder Embarkasi



Sumber. Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Gubernur Sulsel yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi bertindak selaku Inspektur Apel Siaga yang membacakan amanat tertulis Gubernur menyampaikan bahwa persiapan dan kolaborasi yang matang dari panitia akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini utamanya di Embarkasi Makassar.

Seluruh Stake Holder yang terlibat dalam Penyelenggaraan Haji diantaranya Kanwil Kemenag Prov. Sulsel, Dinas kesehatan Pemprov. Sulsel dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar, Imigrasi, Bea Cukai, Obvit Polda Sulsel, UPT Asrama Haji Sudiang, Otorita Bandara, Catering Haji, Dinas Perhubungan, Angkasa Pura dan Pembantu PPIH Embarkasi Makassar dan lainnya.

Tabel. Jemaah Haji Embarkasi Makassar Tahun 2023

| NO | KAB./KOTA | JEMAAH | NO | KAB./KOTA | JEMAAH |
|----|------------------|--------|----|-------------------|--------|
| 1 | KOTA MAKASSAR | 1146 | 13 | KAB. JENEPONTO | 343 |
| 2 | KOTA PARE-PARE | 145 | 14 | KAB. SELAYAR | 116 |
| 3 | KAB. PINRANG | 423 | 15 | KAB. TAKALAR | 308 |
| 4 | KAB. GOWA | 654 | 16 | KAB. BARRU | 196 |
| 5 | KAB. WAJO | 483 | 17 | KAB. SIDRAP | 294 |
| 6 | KAB. BONE | 811 | 18 | KAB. PANGKEP | 344 |
| 7 | KAB. TANA TORAJA | 36 | 19 | KAB. SOPPENG | 296 |
| 8 | KAB. MAROS | 340 | 20 | KAB. ENREKANG | 213 |
| 9 | KAB. LUWU | 309 | 21 | KAB. LUWU UTARA | 263 |
| 10 | KAB. SINJAI | 241 | 22 | KAB. PALOPO | 124 |
| 11 | KAB. BULUKUMBA | 426 | 23 | KAB. LUWU TIMUR | 179 |
| 12 | KAB. BANTAENG | 202 | 24 | KAB. TORAJA UTARA | 23 |

Sumber: Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Sulsel

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan manasik haji serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan khususnya dalam bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah, mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan bimbingan haji dan umrah tersebut;
- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji di Sulawesi Selatan merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
- b. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem di Sulawesi Selatan yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal.

C.5. Dukungan Manajemen

Pada Program Dukungan Manajemen tahun 2023, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp 45,006,977,000 terlihat pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan di Renstra. Selain itu, realisasi anggaran sebesar Rp 44,916,187,635 (99.80%) juga menjadi prestasi tersendiri pada Bagian Tata Usaha sebagai Unit Organisasi pelaksana Program.

Beberapa Sasaran Kinerja yang menjadi fokus Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan diantaranya Sasaran Kinerja: 'Meningkatnya tata kelola organisasi Sekretariat Jenderal yang efektif dan akuntabel'. Dalam upaya meraih target kinerja yang ditetapkan, Kanwil Kemenag Prov. Sulsel melakukan pendampingan ke beberapa Satker yang ditetapkan sebagai pilot project WBK/WBBM Tahun 2023.

Gambar. Penanda Tangan Komitmen Bersama untuk wilayah ZI menuju WBK/WBBM



Sumber. TIM Humas Kanwil Kemenag Sulsel

Selain itu, usaha pendampingan ke Satker daerah juga dibarengi dengan melaksanakan Studi Terapan Pembangunan ZI pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali pada 26 September 2023. Tujuan diadakannya studi terapan ini yakni mengetahui lebih mendalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel. Mengingat Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel telah mampu meraih predikat WBK di tahun 2019 dan WBBM 2022 dan predikat-predikat yang lain, sehingga dapat dijadikan motivasi serta percontohan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel untuk mewujudkan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM.

Gambar. TIM Pembangunan ZI Kemenag Sulsel tiba di Bali





Sumber. Sulsel.kemenag.go.id

Hingga tahun 2022 upaya ini terus dilakukan. Pada upaya pencapaian target Sasaran Kinerja: 'Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)' tahun 2022, telah dilakukan beberapa hal diantaranya Pembinaan Bidang Hukum, Pembinaan Kepegawaian, Pelaksanaan Assessment, Seleksi Penerimaan ASN, Sosialisasi Peraturan-peraturan Kepegawaian.

Pada tahun 2022 jumlah formasi PPPK 2023 yang ditetapkan Menpan RB untuk Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan sebanyak 2139, tapi yang dinyatakan lulus dan telah menerima SK pengangkatan hanya 1.194. terdapat 945 formasi yang tidak terisi, sehingga terbitlah Kepmenpan RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan PPPK Tahun 2022 dan Sulsel mendapatkan kuota 482 orang.

Gambar. Pelantikan dan Penyerahan Surat Keputusan PPPK





Sumber: Tim Humas Kanwil Sulsel

D. Analisis Keberhasilan.

Luasnya wilayah Prov. Sulawesi Selatan menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan bidang keagamaan di masyarakat. Beberapa inovasi yang dilakukan Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan keagamaan diantaranya: Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai dari SBSN sebanyak 12 unit tahun 2018, 6 unit 2019, 15 unit 2020, 6 unit di 2021, 6 unit di tahun 2022 dan 6 unit di tahun 2023. Selain itu pendirian Sekolah Keagamaan yang setiap tahun dilaksanakan, diantaranya Sekolah TK Hindu, Sekolah Adi Widya Pasraman Hindu, LP3KD Katolik di Toraja dan Toraja Utara, PAUD Taman Seminari di Pare-pare tahun 2018 dan Palopo, Makassar, Luwu Utara di 2019, Memberikan bantuan rehab Masjid sebanyak 39 lokasi di Sulsel, PLHUT ke 3 Kabupaten tahun 2021, 2 di tahun 2022, dan 5 di tahun 2023 dll.

Tabel. Analisa Permasalahan, Solusi dan Inovasi Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan

| NO | PERMASALAHAN | SOLUSI | INOVASI |
|----|--|---|--|
| 1 | KONDISI WILAYAH YANG LUAS SERTA KETERBATASAN AKSES MASYARAKAT DALAM PELAYANAN BIDANG KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN. | (1). MENGADAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN UNTUK MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN KEAGAMAAN. (2). MEREKRUT TENAGA PELAYANAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON PNS YANG BERDOMISILI DI DAERAH TERTENTU. | MENDIRIKAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 2 | KONDISI KEAGAMAAN DAN SOSIAL MASYARAKAT YANG PRLURAL SEHINGGA RENTAN TERJADI MISKOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA ALIRAN-ALIRAN AGAMA YANG MENYIMPANG. | MENJAGA PERAN FKUB DAN MENINGKATKAN KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEAGAMAAN DI MASYARAKAT. | MEMPERBANYAK DIALOG KERUKUNAN SERTA KOORDINASI DENGAN LEMBAGA YANG BERKEPENTINGAN. |
| 3 | MASIH TERDAPAT PENYELENGGARA HAJI KHUSUS DAN UMRAH YANG Mencari keuntungan dengan mengabaikan peraturan dan keselamatan jamaah. | Penguatan koordinasi intern dan antar lembaga dalam pelayanan masyarakat serta pengawasan dan pendampingan/prefentif terhadap penyelenggaraan haji khusus dan umrah di Sulawesi Selatan. | (1) Menekankan peningkatan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan haji reguler, khusus dan umrah. (2). Program Manasik haji sepanjang tahun. |
| 4 | Kendala eksternal dalam pengelolaan BMN. | (1). Koordinasi intern dan ekstern (Pemerintah Daerah serta BPN) secara intensif untuk penerbitan sertivikat lahan secepatnya mungkin. (2). Meningkatkan kapabilitas pengelolaan BMN satuan kerja. | (1). Koordinasi intensif dan pembinaan pengelolaan BMN. (2). TOLS-TOLS teknis BMN. |
| 5 | Keterbatasan anggaran program dan belanja modal dalam mencapai target kinerja pelayanan masyarakat. | (1). Meningkatkan konsolidasi dengan pihak terkait pada kantor pusat. (2). Melakukan kerjasama dengan pihak/lembaga lain dalam sinkronisasi program. | Menekankan kualitas pelaksanaan program dan belanja modal pada kemenag Sulsel. |

Sumber. Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Dalam pengukuran Indeks Karakter Siswa yang dilakukan Balitbang Kemenag RI terlihat capaian Prov. Sulawesi Selatan yang senantiasa berada diatas rata-rata Nasional. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan di Sulawesi Selatan yang masif bersama stake holder yang ada. Terlihat beberapa capaian Indeks yang masih lebih rendah dari capaian Nasional diantaranya Indeks Integritas Siswa, Indeks Nasionalisme Siswa, Indeks Kemandirian Siswa, Indeks Karakter Siswa dan Indeks Gotong Royong. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Madrasah-madrasah di Sulawesi Selatan. Ini menjadi perhatian Kemenag Sulawesi Selatan dalam mengarahkan Program dan Kegiatan. Beberapa terobosan yang akan dilakukan diantaranya dengan memasifkan sosialisasi kepedulian sesama dan kepedulian lingkungan

di madrasah, peningkatan karakter kerjasama serta perasaan empati siswa-siswa yang ada di Sulawesi Selatan, dll.

Pelayanan keagamaan pada Satker dan Unit Kerja Kemenag Sulawesi Selatan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstisional pemerintah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi bagi terpenuhinya hak beragama masyarakat. Pelayanan tersebut harus bersifat inklusif dan non-diskriminasi. Selain itu Dukungan Manajemen, Penganggaran serta Kerjasama antar Institusi terus dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi beberapa faktor pendukung keberhasilan pembangunan bidang keagamaan di Sulawesi Selatan yang salah satunya ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Layanan KUA dan Kepuasan Penyelenggaraan Haji.

E. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran tiap-tiap Program pada tahun 2021 dan 2022 terlihat pada table berikut.

Tabel. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

| PROGRAM | SERAPAN ANGGARAN TRIWULAN IV (%) | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | 2022 | 2023 |
| Sekretariat Jenderal dan KUB | 97.95 | 99.80 |
| Bimas Islam | 96.77 | 85.04 |
| Bimas Kristen | 96.14 | 96.14 |
| Bimas Katolik | 93.98 | 98.97 |
| Bimas Hindu | 99.62 | 99.46 |
| Bimas Buddha | 98.54 | 99.94 |
| Pendidikan Islam | 98.40 | 99.59 |
| Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 95.87 | 99.32 |
| TOTAL | 98.19 | 99 |

Sumber. Subag Keuangan dan BMN Kanwil Kemenag Prov. Sulsel

Pada Tabel di atas, terlihat realisasi anggaran untuk setiap Program pada tahun 2022 dan 2023. Terlihat di tahun 2023 persentase realisasi lebih besar dibanding tahun 2022 dan hal tersebut tetap menggambarkan kesesuaian dan efektifitas pengelolaan anggaran pada masing-masing program yang ada.

Total Pagu Revisi pada delapan Satker di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 209,059,387,000 dengan capaian realisasi Rp 206,912,575,081.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat tergambar pencapaian kinerja Kementerian Agama Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Meskipun dapat kita akui bahwa peralihan yang terjadi pada pertengahan tahun terkait terbitnya Renstra 2020-2024, perubahan metode pengukuran serta perubahan Indikator Kinerja yang digunakan berdampak pada penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022 dan 2023 ini. Namun, secara garis besar terlihat tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik dan target kinerja sebagian besar tercapai dengan maksimal. Beberapa Indikator Kinerja dengan capaian tinggi pada tahun 2022.

Tabel. Indikator Kinerja Dengan Capaian Tinggi 2023

| INDIKATOR DENGAN CAPAIAN TINGGI | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Sasaran Perkin dan Indikator Kinerja Target Renstra | Program Kemenag | Capaian (%) Tw I | Capaian (%) Tw II | Capaian (%) Tw III | Capaian (%) Tw IV | Keterangan |
| [75] Sasaran Kinerja: Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan Target Renstra Kementerian: 2000 | Program Bimas Islam | 0% | 0% | 104% | 104% | Jumlah layanan pembinaan syariah sebanyak 60 pembinaan |
| [76] Sasaran Kinerja: Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat | Program Bimas Islam | 0% | 0% | 120% | 120% | Jumlah sertifikat pengukuran arah kiblat 94 sertifikat |

| | | | | | | |
|---|------------------------|----|----|------|------|--|
| Target Renstra Kementerian: 1000 | | | | | | |
| [111] Sasaran Kinerja: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Indikator: Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan Target Renstra Kementerian: 820000 | Program Bimas Islam | 0% | 0% | 120% | 120% | Jumlah kitab suci dan buku keagamaan disalurkan ke masyarakat 1500 eksemplar |
| [135] Sasaran Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk Indikator: Jumlah pengadaan sarana prasarana KUA Target Renstra Kementerian: 200 | Program Bimas Islam | 0% | 0% | 120% | 120% | Jumlah KUA yang direvitalisasi sebanyak 25 unit KUA |

Sumber. Sipka.kemenag.go.id

Seluruh capaian tinggi tersebut melalui program Bimbingan Masyarakat Islam. Beberapa keberhasilan di antaranya terlihat dari pencapaian Indikator Kinerja dalam mengukur pencapaian Sasaran yang melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023. Beberapa analisis telah dilakukan pada bab sebelumnya untuk mengetahui kesesuaian antara Sasaran dengan hasil dan manfaat serta dampak. Dapat disimpulkan bahwa Program kegiatan yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan telah berjalan dengan optimal dan telah terjadi kesesuaian antara Sasaran dan Output yang ingin dicapai dengan persentase capaian Indikator Kinerja 2023 sebesar 93.19% dan capaian serapan anggaran sebesar 98.19%.

B. Kendala

Selain itu penyesuaian metode kerja, penganggaran, metode pengukuran kinerja selama tahun 2022 dan 2023 yang kerap kali terjadi dan menjadi tantangan dalam Pencapaian Kinerja serta penyajian Laporan Capaian Kinerja. Beberapa Indikator Kinerja dengan pencapaian yang rendah.

C. Upaya Tindak Lanjut

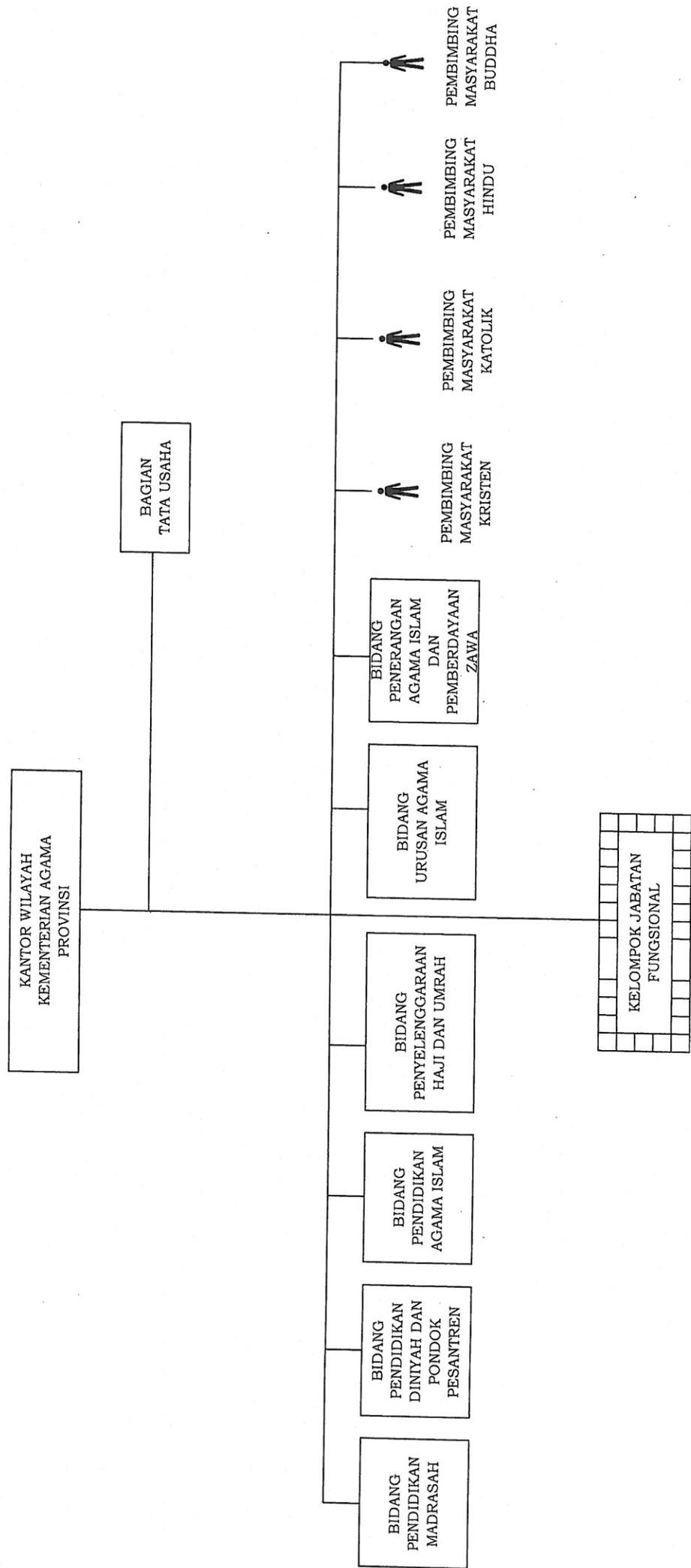
Upaya tindak lanjut diantaranya :

- Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 dengan Indikator Kinerja yang sudah jelas seiring telah terbitnya Renstra Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan tahun 2020-2024,
- Meningkatkan kualitas konsolidasi pada bagian perencanaan, dan pelaksanaan agar tercipta output pada program yang lebih optimal,
- Menyesuaikan metode pencapaian target kinerja dengan situasi saat Pandemi Covid 19 dengan situasi pemulihan (recovery) yang saat ini sedang berjalan,
- Meskipun pada dasarnya pencapaian telah baik, tetap perlu ditingkatkan penyerapan anggaran triwulan serta kualitas outcome dan output pelaksanaan kegiatan.

Beberapa Indikator Kinerja yang belum tercapai di tahun 2023 ini akan menjadi perhatian Unit Kerja terkait untuk upaya pencapaian Target Kinerja Tahun 2024. Salah satunya dengan penyesuaian metode kerja yang lebih baik dan efektif.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN SULAWESI SELATAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaeroni
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nizar
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke-7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Bali, 13 Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Nizar



Khaeroni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|----------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama | 1 Nilai Kinerja Penyuluh Agama | 92,17 Nilai |
| | | 2 Persentase Penyuluh Agama yang Dibina | 88,15 % |
| | | 3 Jumlah Penziar Agama yang Dibina Kompetensi | 63 Orang |
| | | 4 Jumlah Kelompok Sasaran Penyuluh yang Diberdayakan | 2.717 Kelompok |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama | 1 Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Beragama yang Ditindaklanjuti | 100,00 % |
| | | 2 Jumlah Aktor Kerukunan yang Dibina | 320 Orang |
| | | 3 Jumlah Desa Sadar Kerukunan yang Dibina | 2 Lokasi |
| 3 | Menguatnya Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Masyarakat sebagai Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 1 Jumlah Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi | 6 Lembaga |
| | | 2 Jumlah Forum Dialog Antar Umat Beragama yang Diselenggarakan | 6 Kegiatan |
| 4 | Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | 1 Persentase Sekber FKUB yang Ditingkatkan Layanannya Melalui BOP | 100,00 % |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama | 1 Persentase Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang Dibina Kerukunan Intra Umat Beragama | 50,00 % |
| | | 2 Jumlah Forum Dialog Intra Umat Beragama yang Diselenggarakan | 8 Lokasi |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama | 1 Persentase Penyuluh Agama yang Berwawasan Moderat | 96,67 % |
| 7 | Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran | 1 Persentase Rumah Ibadah yang Ramah | 59,97 % |
| | | 2 Persentase Pengelola Rumah Ibadah yang Dibina | 28,00 % |
| | | 3 Jumlah Imam Besar Masjid yang Ditingkatkan Mutunya | 485 Orang |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------------|
| 8 | Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama di Ruang Publik | 1 Jumlah Siaran Keagamaan yang Berwawasan Moderat di Media Massa dan Ruang Publik | 17 Lokasi |
| 9 | Menguatnya Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama di Ruang Publik | 1 Persentase Siswa di Madrasah yang Memperoleh Pendidikan Agama yang Bermuatan Moderasi Beragama | 90,00 % |
| | | 2 Persentase Siswa di Sekolah Keagamaan yang Memperoleh Pendidikan Agama yang Bermuatan Moderasi Beragama | 68,33 % |
| | | 3 Persentase Siswa di Sekolah Umum yang Memperoleh Pendidikan Agama yang Bermuatan Moderasi Beragama | 49,80 % |
| | | 4 Persentase Guru di Madrasah yang Dibina Dalam Moderasi Beragama | 14,50 % |
| | | 5 Persentase Guru Pendidikan Agama di Sekolah Umum yang Dibina Dalam Moderasi Beragama | 24,33 % |
| | | 6 Persentase Guru di Sekolah Keagamaan yang Dibina Dalam Moderasi Beragama | 6,67 % |
| | | 7 Persentase Pengawas Pendidikan Agama di Madrasah yang Dibina Dalam Moderasi Beragama | 21,65 % |
| | | 8 Persentase Pengawas Pendidikan Agama di Sekolah Keagamaan yang Dibina Dalam Moderasi Beragama | 10,00 % |
| | | 9 Persentase Pengawas Pendidikan Agama di Sekolah Umum yang Dibina Dalam Moderasi Beragama | 45,00 % |
| | | 10 Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah yang Bermuatan Moderasi Beragama | 250 Kegiatan |
| 10 | Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren Dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam | 1 Persentase Pesantren yang Berwawasan Moderat | 98,00 % |
| | | 2 Persentase Peningkatan Peserta Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an | 4,50 % |
| 11 | Menguatnya Dialog Lintas Agama dan Budaya | 1 Jumlah Dialog Lintas Agama dan Budaya yang Diselenggarakan | 50 Kegiatan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------------|
| 12 | Meningkatnya Pelestarian dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat | 1 Jumlah Produk Budaya Berbasis Agama yang Memberikan Manfaat terhadap Kesejahteraan Umat (Wisata Religi, Situs, Artefak) | 5 Unit |
| 13 | Meningkatnya Penghormatan atas Keragaman Budaya yang Merupakan Wujud dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama | 1 Jumlah Kegiatan Ekspresi Budaya yang Mengandung Nilai Agama (MTQ, STQ, Pesparawi, Utsawa Dharma Ghita, Sippa Dhamma Samajja dan sebagainya) | 6 Kegiatan |
| 14 | Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama | 1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina | 14 Dokumen |
| | | 2 Jumlah Pengelola Perpustakaan Rumah Ibadah yang Dibina | 20 Orang |
| 15 | Meningkatnya Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan | 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan yang Disediakan | 126 Unit |
| | | 2 Jumlah Kitab Suci dan Buku Keagamaan yang Disediakan | 125 Eksemplar |
| | | 3 Persentase Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi | 29,33 % |
| | | 4 Jumlah Bimbingan Layanan Syariah yang Disediakan | 58 Kegiatan |
| | | 5 Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi Pengukuran Arah Kiblat | 39 Lokasi |
| | | 6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang Dibina | 20 Orang |
| 16 | Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk | 1 Jumlah KUA yang direvitalisasi | 5 Lokasi |
| | | 2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana | 15 Lokasi |
| | | 3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah | 8.300 Orang |
| | | 4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah | 8.770 Orang |
| | | 5 Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina | 212 Orang |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|----------------|
| 17 | Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga | 1 Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya | 2.796 Pasangan |
| 18 | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus | 1 Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi | 90,00 % |
| | | 2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi | 84,00 % |
| 19 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | 1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan | 42,23 % |
| | | 2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan | 0,35 % |
| 20 | Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji | 1 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu | 87,00 % |
| 21 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji | 1 Persentase petugas haji yang profesional | 87,85 % |
| | | 2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji | 96,00 % |
| 22 | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu | 1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) | 97,00 % |
| 23 | Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat | 1 Persentase amil yang dibina | 4,93 % |
| | | 2 Persentase lembaga zakat yang dibina | 73,51 % |
| 24 | Meningkatnya pengelolaan aset wakaf | 1 Persentase lembaga wakaf yang dibina | 80,00 % |
| | | 2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan | 20,00 % |
| | | 3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat | 16,67 % |
| 25 | Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif | 1 Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum | 90,00 % |
| | | 2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum | 80,00 % |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------|
| | | 3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan | 1 Lembaga |
| | | 4 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan | 1 Lembaga |
| 26 | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan | 1 Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 50,03 % |
| | | 2 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 57,52 % |
| | | 3 Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 50,03 % |
| | | 4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan | 3 Orang |
| | | 5 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan | 100,00 % |
| 27 | Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran | 1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran | 35,00 % |
| | | 2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran | 18,50 % |
| | | 3 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | 32,50 % |
| 28 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan | 1 Persentase RA/ Pratama Widya Pasraman/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana | 54,00 % |
| | | 2 Persentase MI/ Ula/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | 59,67 % |
| | | 3 Persentase MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | 47,67 % |
| | | 4 Persentase MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | 63,67 % |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|---------------|
| 29 | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat | 1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah | 255.527 Orang |
| | | 2 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS | 3.587 Orang |
| | | 3 Persentase siswa madrasah penerima PIP | 22,00 % |
| | | 4 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP | 61,04 % |
| | | 5 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional | 13,00 % |
| 30 | Meningkatnya kualitas penanganan ATS | 1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi | 0,17 % |
| | | 2 Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren | 40,00 % |
| 31 | Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah | 1 Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP | 38.203 Orang |
| 32 | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi | 83,00 % |
| | | 2 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi | 16,51 % |
| | | 3 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi | 12,65 % |
| | | 4 Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG | 25,00 % |
| 33 | Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal | 1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | 67,75 % |
| | | 2 Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | 81,25 % |
| 34 | Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru | 1 Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG | 7,00 % |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-------------|
| | melalui peningkatan kualifikasi pendidik | 2 Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG | 85,00 % |
| | | 3 Persentase guru pendidikan agama berkualifikasi minimal S1 | 82,00 % |
| | | 4 Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2 | 2,40 % |
| 35 | Memuatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi | 1 Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi | 278 Lembaga |
| | | 2 Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. | 19 Lembaga |
| 36 | Meningkatnya budaya mutu pendidikan | 1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu | 80,00 % |
| | | 2 Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | 4,90 % |
| | | 3 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | 5,00 % |
| 37 | Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan | 1 Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | 85,00 % |
| | | 2 Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | 60,00 % |
| | | 3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman | 80,00 % |
| | | 4 Persentase madrasah yang ramah anak | 70,00 % |
| | | 5 Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak | 40,00 % |
| 38 | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan | 1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan | 25 Kegiatan |
| | | 2 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan | 10 Kegiatan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-------------|
| | | 3 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina | 27 Unit |
| | | 4 Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina | 2 Unit |
| 39 | Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum | 1 Persentase kasus hukum yang terselesaikan | 95,00 % |
| | | 2 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan | 10 Kegiatan |
| 40 | Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri | 1 Persentase rekomendasi izin orang asing | 97,00 % |
| 41 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | 1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja | 100,00 % |
| | | 2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti | 95,00 % |
| | | 3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan | 80,00 % |
| | | 4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) | 85,88 % |
| | | 5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya | 86,88 % |
| | | 6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu | 95,00 % |
| | | 7 Persentase data ASN yang diupdate | 90,00 % |
| 42 | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | 1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | 50 Dokumen |
| | | 2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) | 99,00 % |
| | | 3 Persentase penyerapan pelaksanaan anggaran yang optimal | 97,80 % |
| | | 4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama | 70,00 % |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-----------|
| 43 | Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel | 1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya | 49,93 % |
| | | 2 Persentase tanah yang bersertifikat | 40,00 % |
| | | 3 Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN | 99,00 % |
| 44 | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi | 1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 85,00 % |
| | | 2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi | 80,00 % |
| | | 3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti | 95,00 % |
| 45 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | 1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi | 95,00 % |
| | | 2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas | 21 Satker |
| | | 3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja | 36 Orang |
| 46 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | 1 Persentase output perencanaan yang berbasis data | 95,00 % |
| | | 2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra | 90,88 % |
| | | 3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti | 75,00 % |
| 47 | Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran | 1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas | 96,00 % |
| | | 2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti | 75,00 % |
| 48 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar | 90,00 % |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|-------------|
| 49 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | 1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | 100,00 % |
| | | 2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik | 100,00 % |
| | | 3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen | 100,00 % |
| | | 4 Persentase menurunnya lelang gagal | 89,60 % |
| | | 5 Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding | 86,90 % |
| 50 | Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga | 1 Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan | 90,00 % |
| 51 | Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi | 1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi | 20 Kegiatan |
| | | 2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter | 95,00 % |
| 52 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | 1 Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar | 25 Unit |
| | | 2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable | 90,00 % |
| 53 | Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan | 1 Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional | 100,00 % |

Nilai Kinerja Anggaran : 95

Program dan Kegiatan

Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp 57.086.434.000

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

Rp 103.300.000

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Rp 596.656.000

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

Rp 20.186.273.000

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

Rp 284.848.000

Pembinaan Administrasi Perencanaan

Rp 612.904.000

| Program dan Kegiatan | Anggaran | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Pembinaan Administrasi Umum | Rp | 12.971.778.000 |
| Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | Rp | 278.026.000 |
| Dukungan Manajemen Pendidikan | Rp | 10.202.941.000 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam | Rp | 2.289.350.000 |
| Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | Rp | 5.971.492.000 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen | Rp | 314.760.000 |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen | Rp | 75.590.000 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik | Rp | 206.178.000 |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik | Rp | 316.887.000 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu | Rp | 120.680.000 |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu | Rp | 211.400.000 |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha | Rp | 350.000.000 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Rp | 1.993.371.000 |
| Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | Rp | 19.344.804.000 |
| Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu | Rp | 46.000.000 |
| Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama | Rp | 1.131.388.000 |
| Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah | Rp | 2.676.705.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf | Rp | 1.077.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam | Rp | 811.000.000 |
| Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah | Rp | 585.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen | Rp | 404.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik | Rp | 884.400.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu | Rp | 643.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha | Rp | 559.000.000 |
| Pembinaan Umrah dan Haji Khusus | Rp | 187.402.000 |

| Program dan Kegiatan | Anggaran | |
|--|-----------------|------------------------|
| Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp | 180.113.000 |
| Pembinaan Haji | Rp | 1.159.796.000 |
| Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran | Rp | 181.446.512.000 |
| Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu | Rp | 6.000.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam | Rp | 16.882.400.000 |
| Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | Rp | 161.061.614.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah | Rp | 1.411.075.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam | Rp | 996.750.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen | Rp | 159.000.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik | Rp | 387.173.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu | Rp | 290.000.000 |
| Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha | Rp | 252.500.000 |
| Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun | Rp | 2.153.200.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam | Rp | 1.585.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah | Rp | 23.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen | Rp | 50.200.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik | Rp | 20.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu | Rp | 365.000.000 |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha | Rp | 110.000.000 |
| Jumlah seluruh | Rp | 260.030.950.000 |

Bali, 13 Desember 2022

Atasan Pimpinan Satuan Kerja,



Nizar

Pimpinan Satuan Kerja,



Maerani